

Peran Humas dalam Pelaksanaan Program Penurunan Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas

Anastasia Leony¹, Shinta Prastanti², Mite Setiansah³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Jenderal Soedirman

Brubahan, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122

[1anastasia.leony.d@mhs.unsoed.ac.id](mailto:anastasia.leony.d@mhs.unsoed.ac.id), [2shinta.prastyanti@unsoed.ac.id](mailto:shinta.prastyanti@unsoed.ac.id), [3mite.setiansah@unsoed.ac.id](mailto:mite.setiansah@unsoed.ac.id)

Received: February 2024; Accepted: April 2024; Published: June 2024

Abstract

The Infant Mortality Rate (IMR) in Banyumas Regency continued to showed fluctuating trend from 2017-2023, thus requiring more attention. This condition has prompted the Banyumas Regency Government to continuously make various efforts to curb the rising IMR in the future. These efforts are implemented through various programs to create understanding from the Banyumas Regency Health Office to the public. In executing these programs, there are public relations strategies used to support the optimal implementation of the programs. Each program has different objectives and target groups. This is based on the awareness that to control the Infant Mortality Rate, the government cannot focus on one target alone. Not only to create understanding among the public, but coordination among various health agencies is also important. This study aims to describe how public relations roles are utilized in each program that has been implemented to reduce the Infant Mortality Rate. This study uses a qualitative descriptive research method with case study data analysis. The data analyzed are derived from documents of Banyumas Regency reports from 2017-2023, supported by other written documents from various sources. The results indicate that in maximizing the process of reducing and preventing the increase in Infant Mortality Rate, the Banyumas Regency government utilizes public relations roles in various forms. The utilization of various public relations activities is adjusted to the objectives of each program, both online and offline.

Keyword: Public Relations Strategies; Health Communication; Infant Mortality Rate (IMR).

Abstrak

Sejak tahun 2017-2023, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banyumas masih menunjukkan angka yang fluktuatif sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi ini menjadikan Pemerintah Kabupaten Banyumas terus melakukan berbagai upaya dalam menekan semakin melonjaknya AKB pada waktu mendatang. Upaya-upaya tersebut diaplikasikan dalam berbagai program untuk menciptakan pemahaman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas kepada masyarakat. Dalam menjalankan program-program tersebut, terdapat strategi kehumasan yang digunakan untuk mendukung berjalannya program dengan maksimal. Masing-masing program memiliki tujuan dan target sasaran yang berbeda. Hal tersebut didasari oleh kesadaran bahwa untuk mengendalikan Angka Kematian Bayi, pemerintah tidak dapat berfokus pada satu sasaran saja. Tak hanya untuk menciptakan pengertian pada masyarakat, koordinasi dari masing-masing instansi kesehatan menjadi penting pula. Penulisan kajian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana peran kehumasan dimanfaatkan dalam masing-masing program yang telah berjalan dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data studi kasus. Data yang dianalisis berasal dari dokumen-dokumen laporan Daerah Kabupaten Banyumas pada kurun waktu 2017-2023 yang didukung dengan dokumen tertulis lainnya dari berbagai sumber. Hasil menunjukkan bahwa dalam memaksimalkan proses untuk menekan dan mencegah melonjaknya Angka Kematian Bayi, pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan peran kehumasan yang diaplikasikan dalam pelaksanaan berbagai program dengan wujud yang bervariasi. Pemanfaatan kegiatan kehumasan yang bervariasi tersebut disesuaikan dengan tujuan masing-masing program secara daring maupun luring.

Kata Kunci: Strategi Kehumasan; Komunikasi Kesehatan; Angka Kematian Bayi.

doi: [10.51544/jlmk.v8i1.4961](https://doi.org/10.51544/jlmk.v8i1.4961)

©2024 Jurnal Psychomutiara. This is an open access article under the CC BY-SA license

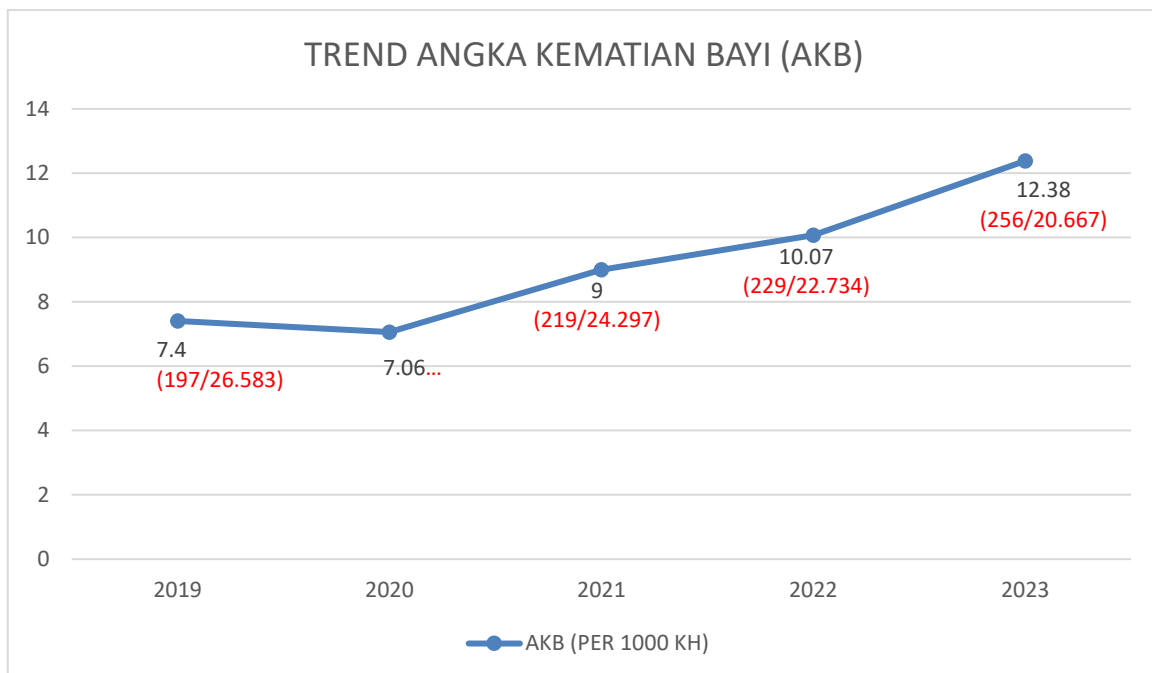
Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Psikologi/index>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi salah satu aspek yang terus dikendalikan pada masing-masing kabupaten di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan nomor 3 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), nomor 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) (Bappenas, 2023). Tujuan nomor 3 pada SDGs memiliki beberapa target, terutama pada poin target 3.2 yang bertujuan untuk mengurangi rasio angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) pada tahun 2030 (Bappenas, 2023). Hal ini menjadikan Angka Kematian Bayi sebagai salah satu isu kesehatan yang penting untuk diperhatikan.

Banyumas menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki Angka Kematian Bayi terus meningkat sejak tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019-2020 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan namun kembali meningkat pada tahun 2021-2023. Adapun berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2023, penyebab kasus kematian bayi disebabkan oleh Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan kelainan kongenital.



Gambar 1. Grafik Tren Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH) di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 - 2023
Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2023

Usaha menekan angka kematian bayi menjadi target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas setiap tahunnya. Hal tersebut didukung pula dengan kesadaran bahwa pengendalian Angka Kematian Bayi sangat memerlukan keterlibatan dan peran aktif seluruh pihak pemerintahan baik pusat, daerah maupun parlemen dan pihak-pihak yang memiliki andil dalam melakukan pembangunan secara nasional maupun internasional. Sebagai lembaga pemerintah, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas memiliki target kinerja yang harus diinformasikan pula pada masyarakat sehingga informasi mengenai hal ini harus disebarluaskan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap organisasi atau perusahaan, termasuk instansi pemerintah, menginginkan citra yang baik di mata masyarakat, dan dapat dikatakan berhasil atau tidaknya suatu organisasi tergantung pada keberhasilan pelaksanaan kehumasan dan manajemen hubungan dengan publiknya (Ginting & Rahmalinda, 2018).

Guna mengetahui akar penyebab masalah kematian ibu dan bayi, Dinas Kesehatan telah secara rutin melaksanakan audit maternal perinatal setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan pula untuk mengetahui kondisi perkembangan, perencanaan pengendalian, serta pencegahan memburuknya Angka Kematian Bayi. Dalam rangka meningkatkan pengawasan pada kesehatan ibu hamil dan bayi, telah banyak upaya pula yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui berbagai macam program. Komunikasi kesehatan dimanfaatkan dalam setiap perencanaan program penurunan Angka Kematian Bayi. Komunikasi kesehatan melibatkan pemanfaatan berbagai layanan komunikasi guna menyampaikan pesan serta memengaruhi keputusan terkait langkah-langkah untuk meningkatkan dan mengelola kesehatan baik secara personal maupun dalam masyarakat (Surayya, 2018). Selain itu, pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2022, dicantumkan pula usaha pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka pelaksanaan penanganan kesehatan ibu dan anak dengan beberapa indikator penting yang dimuat pada pelayanan kesehatan ibu dan anak guna sebagai landasan resmi rencana program-program yang akan diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas .

Pada pelaksanaannya, upaya-upaya komunikasi kesehatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas didukung pula dengan proses kehumasan didalamnya. Proses kehumasan menjadi salah satu kunci strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas terutama Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program-programnya. Penerapan komunikasi kesehatan yang dipadukan dengan strategi kehumasan, diringkas dalam sebuah strategi komunikasi kesehatan. Hal tersebut secara harfiah merupakan kombinasi antara manajemen komunikasi dan perencanaan dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama dalam memecahkan atau meminimalisir krisis pada bidang kesehatan (Paramasari, dkk, 2021). Kajian ini mencatat program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan penerapan kegiatan kehumasan serta komunikasi kesehatan dalam menangani krisis. Penulis tertarik untuk menulis kajian ini dikarenakan kesehatan bayi dan keselamatan neonatal sebagai keberlangsungan hidup generasi baru penting untuk diupayakan oleh pemerintah setempat.

Manfaat penulisan ini dapat menjadi pendukung upaya penekanan angka kematian bayi yang perlu terus ditingkatkan, mengingat pada tahun 2021 hingga 2023 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banyumas masih meningkat sehingga perlu ditekan. Kajian ini ditopang dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dari subjek, objek, landasan teori maupun metode penelitian. Namun, penelitian terdahulu yang digunakan tetap memiliki kesamaan dari segi tema besar yaitu pemanfaatan berbagai media komunikasi kesehatan serta aktivitas kehumasan yang diaplikasikan pada penerapan program komunikasi kesehatan dalam menangani suatu isu tertentu. Kajian ini posisi dan sifatnya melahirkan penelitian baru yang menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang dipilih sebagai pedoman, referensi dan acuan baik dari segi data, konsep maupun penyampaian substansi.

Kebaruan dari kajian ini terletak pada variasi pemanfaatan aspek kehumasan yang diambil; serta hubungan objek dan lokasi penelitian yang diambil menjadi kebaruan pula karena belum terdapat kajian sejenis yang mengambil objek dan lokasi yang sama secara bersamaan. Kajian ini memiliki keunggulan penelitian dari aspek kemanfaatan hasil kajian dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah memecahkan krisis melalui program-program yang menggunakan peran kehumasan. Menjadi lebih penting karena dalam memecahkan masalah kesehatan yang terjadi pada sebuah wilayah kurang referensi dalam bidang keilmuan, maka proses pembangunan, penanganan krisis dan menjaga kesejahteraan masyarakat akan terhambat.

Merujuk pada tema yang diuraikan pada kajian ini maka ditariklah beberapa penelitian terdahulu yang senada dan memiliki kesamaan dalam segi tema besar. Salah satunya, kajian yang berjudul “Monitoring Dan Evaluasi Humas Pemerintah Dalam Penggunaan Media Sosial Untuk Memerangi Hoaks” oleh Kurniati, dkk, 2020. Kajian ini didasari dari adanya 800ribu situs di Indonesia yang sudah terdeteksi sebagai situs benyeban hoaks dan ujaran kebencian yang kemudian menjadikan pemerintah terutama Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ditjen IKP melakukan tindakan preventif guna mengurangi dampak negatif yang akan terjadi kepada masyarakat berupa penggunaan media sosial oleh Kemenkominfo. Hal yang akan dialami berupa bagaimana proses kerja Ditjen IKP dalam menentukan pemilihan media sosial yang kemudian melakukan monitoring serta evaluasi terhadap keputusan tersebut. Kajian yang menarik ini menggunakan deskriptif kualitatif dan teori sistem komunikasi Humas atau Public Relation (PR). Hasil dari kajian ini ditemukan bahwa Ditjen IKP sebagai humas pemerintah telah melakukan fungsinya sesuai dengan prosedur manajemen komunikasi. Namun, pada praktiknya pelaksanaan tugas humas oleh Ditjen IKP kurang maksimal yang berkaitan pula dengan kurang maksimalnya hasil usaha preventif yang diupayakan kepada masyarakat.

“Strategi Humas & Protokol Pemerintahan Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Humas & Protokol Pemerintahan Kabupaten Jombang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Program Bulaga “Bupati Melayani Warga” oleh Eli Puspitasati, dkk, 2021 digunakan pula sebagai penelitian terdahulu pada kajian ini. Fokus kajian yang disoroti berupa strategi humas dan protokol Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pelayanan publik melalui program Bulaga (Bupati melayani warga). Didasari dari kondisi bahwa program bulaga dapat menaikkan Indeks Kepuasan Masyarakat jika dibandingkan dari tahun 2017-2019. Hal ini membuktikan bahwa respon masyarakat baik dan percaya kepada pemerintah dalam serius melayani warga. Metode yang digunakan pada kajian tersebut adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Digunakan pula teori sistem dan fungsi boundary spanning untuk menganalisis payung besarnya yaitu strategi humas pemerintah. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa program bulaga yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang telah terbukti dapat meningkatkan pelayanannya kepada warga yang dapat dibuktikan dengan kepuasan secara kuantitatif dan kualitatif sehingga meningkatkan kepercayaan warga kepada pemerintah dalam konteks pelayanan publik.

Pola tema dari penelitian terdahulu memiliki yang sama dari segi penerapan konsep kehumasan yang dipraktikkan pemerintah dalam hubungannya dengan melayani, menangani kasus dan mensejahterakan masyarakatnya. Selain tema kehumasan kan komunikasi publik, tema komunikasi pembangunan digunakan pula pada ketiga penelitian-penelitian tersebut. Secara garis besar, perbedaan yang dimiliki dari ketiga penelitian tersebut terletak dari subjek, dan metode penelitiannya. Perdebatan yang dibahas dari ketiga penelitian terdahulu memiliki kesamaan pula dalam konteks bagaimana kehumasan dapat dimanfaatkan dalam bidang komunikasi pemerintahan dan sektor publik dalam berbagai macam variasi dan implikasi yang berbeda-beda. Pada kajian yang dituliskan ini, perdebatan yang diambil merupakan perwujudan pula dari bervariasinya penerapan aspek kehumasan komunikasi pada konteks komunikasi pemerintah, publik dan pembangunan dimasyarakat terutama pada aspek manajemen kehumasan.

Gap atau jarak dari ketiga kajian ini tak memiliki perbedaan yang terlalu jauh, karena kesamaan awal dari segi tema, konteks, dan payung besar yang hampir mirip. Hanya saja, pada masing-masing penelitian terdahulu, memiliki kekhasan tersendiri seperti penerapan aspek kehumasan seperti monitoring, menguji keterlibatan masyarakat dengan komunikasi publik, dan strategi kehumasan secara khusus. Kajian penulis sendiri lebih mengarah kepada penerapan aspek manajemen kehumasan dalam

menangani krisis kesehatan di sektor pemerintahan. Berdasarkan ulasan dari kajian-kajian yang digunakan, penulis menggunakannya sebagai referensi penulisan kajian, dan variasi aspek keilmuan subjek-objek-lokasi penelitian yang berbeda.

Kebaruan dari kajian ini terletak pada penerapan aspek kehumasan yang diambil yang diwujudkan dalam berbagai bentuk upaya penurunan Angka Kematian Bayi Disamping itu, hubungan objek dan lokasi penelitian yang diambil menjadi kebaruan pula karena belum terdapat penelitian sejenis yang mengambil objek dan lokasi penelitian yang sama secara bersamaan. Kajian ini memiliki keunggulan penelitian dari aspek kemanfaatan hasil kajian dapat digunakan untuk melihat bagaimana proses pemerintah memecahkan krisis melalui peran kehumasan yang kemudian dapat dievaluasi dan terus diperbaiki guna membangun kesejahteraan masyarakat. Menjadi lebih penting karena jika memecahkan krisis pemerintahan dalam konteks kesehatan dan jika tidak atau kurang referensi dalam bidang keilmuan, maka proses pembangunan, penanganan krisis dan menjaga kesejahteraan masyarakat akan terhambat.

Praktik humas yang efektif pada dasarnya merupakan suatu proses yang dimulai dengan identifikasi masalah melalui penelitian. Menurut Cutlip & Center (dalam Fitriyaningsih & Kholik, 2021), untuk melaksanakan program kerja humas dengan efektif, dapat dilakukan melalui "empat tahap atau langkah utama", yang meliputi:

- a) Penemuan Fakta: Tahap ini melibatkan penemuan fakta dan informasi yang relevan dengan kepentingan organisasi.
- b) Perencanaan dan Pengambilan Keputusan: Perencanaan menjadi tahap krusial karena menghubungkan aktivitas komunikasi dengan kepentingan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, seorang petugas humas merencanakan bagaimana pesan komunikasi akan dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti psikologis, sosiologis, dan kondisi sosial ekonomi politik.
- c) Komunikasi dan Aksi: Tahap ini melibatkan pelaksanaan komunikasi yang efektif, mempertimbangkan bagaimana pesan dikomunikasikan dan apa yang dikomunikasikan untuk menciptakan dampak yang signifikan pada pihak yang relevan.
- d) Evaluasi: Setelah pelaksanaan komunikasi, organisasi ingin mengetahui dampaknya terhadap publik atau audiens. Pada tahap ini, humas melakukan evaluasi terhadap hasil program kerja atau kegiatan humas lainnya yang telah dilaksanakan, serta efektivitas teknik manajemen dan komunikasi yang digunakan.

Tahapan-tahapan program kerja humas yang telah dilakukan oleh sebuah institusi atau organisasi didukung pula oleh strategi humas melalui berbagai macam pendekatan (Public Relation Organization). Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk memenuhi tanggung jawab dan menciptakan kesesuaian antara organisasi dan audiensnya untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan atau Strategi Operasional menjadi pendekatan paling dominan yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi. Program-program kehumasan yang telah diwujudkan dan dilaksanakan pada artikel ini pada dasarnya merupakan program kemasyarakatan (Sosial Approach). Strategi Operasional dilakukan melalui mekanisme dan nilai-nilai sosial budaya yang diterapkan dalam masyarakat, pihak kehumasan bekerja secara penuh. Tak hanya mampu mendengar, kegiatan kehumasan dituntut untuk mampu mendengarkan aspirasi-aspirasi yang ada dalam masyarakat baik dari segi moral, etika maupun nilai-nilai sosial yang menyertainya (Simamora & Sihombing, 2019). Disamping itu, strategi yang digunakan dalam menjalankan kegiatan kehumasan memerlukan beberapa

keterampilan yang dapat diandalkan, orang-orang yang dapat dipercaya, pengawasan, koordinasi, perhatian terhadap setiap detail dan pelaksanaan yang profesional. Kemampuan teknis menyebarkan informasi untuk berbagai tujuan melalui saluran komunikasi yang berbeda (pribadi, publik, kolektif, media, cetak, audio dan visual) menjadi aspek yang krusial pula (Lani & Handayani, 2021).

Konsep lain yang digunakan didasari pula dari Angka Kematian Bayi (AKB) yang memiliki defisini banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai beriku; 70 sangat tinggi, 40 – 70 tinggi, 20-39 sedang, dan <20 rendah (BPS, 2022). Angka kematian bayi menjadi indikator penting yang disasari oleh keadaan atau derajat kesehatan masyarakat pada suatu daerah. Hal tersebut didasari karena kesehatan bayi yang baru lahir sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal orang tuanya dan berkaitan pula dengan status sosial orang tua bayi tersebut. Kemajuan yang dicapai dalam pencegahan dan pengendalian berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin jelas pada penurunan angka kematian bayi. Oleh karena itu, angka kematian bayi merupakan ukuran yang sensitif terhadap seluruh upaya intervensi pemerintah, khususnya pada bidang kesehatan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data studi kasus. Pada analisis studi kasus, penulis bebas menciptakan struktur tulisan yang berdasar domain kajian serta mengembangkan domain lainnya sesuai keinginan. Kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif memiliki fokus pada deskriptif data dan analisis induktif sehingga berarti lebih mengutamakan proses daripada hasil akhir (Akbar, 2015 dalam Triyono & Wibowo, 2018). Kajian deskriptif hanya memaparkan peristiwa atau kondisi sehingga tidak menjelaskan hubungan, membuat prediksi atau menguji hipotesis. Penggunaan model deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada kajian ini memiliki sifat yang menyebar di permukaan namun berpusat pada unit tertentu dari berbagai fenomena. Penelitian deskriptif-kualitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam dengan menggunakan proses pengumpulan data dan metode studi kasus (Candraningrum, 2017).

Oleh karenanya, penulisan kajian ini berupaya untuk menulis deskripsi yang berpusat pada bagaimana bentuk penerapan kegiatan kehumasan pada program-program kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang ditujukan untuk mengurangi dan mengendalikan laju Angka Kematian Bayi. Penggunaan telaah dokumen dengan teknik pengumpulan data pada kajian ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan data penulis dalam mencapai tujuan penelitian. Sumber pengumpulan data yang penulis gunakan berasal dari berbagai sumber tertulis. Sumber tertulis yang digunakan berasal dari informasi maupun kajian terdahulu dari kanal digital maupun konvensional antara lain; Profil Kesehatan Dinas Kabupaten Banyumas, artikel pada internet, website institusi resmi yang mencantumkan data Angka Kematian Bayi di Indonesia. Dari sumber-sumber tertulis yang didapatkan, penulis kemudian melakukan pengumpulan, mengelompokan dan mengorganisir informasi serta menelaah data tertulis dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan program upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam menekan angka kematian bayi dan proses kegiatan kehumasan yang dilakukan didalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas menyadari bahwa untuk mengatasi masalah kesehatan, diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang tepat dan sistematis. Untuk mengatasi terus bertumbuhnya Angka Kematian Bayi, maka diciptakanlah berbagai program yang diharapkan mampu menekan pertumbuhan Angka Kematian Bayi. Pada praktiknya, setiap program yang

dilaksanakan tidak hanya berfokus untuk mengurangi dan menekan laju pertumbuhan Angka Kematian Bayi, namun sekaligus mengurangi Angka Kematian Ibu dan Balita. Realisasi program-program upaya penurunan Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas memiliki segmentasi masyarakat yang berbeda. Tak hanya ditujukan untuk ibu, namun ditujukan pula bagi para tenaga medis yang terlibat secara langsung untuk menangani ibu hamil serta sektor-sektor di Pemerintahan Kabupaten Banyumas. Perbedaan tujuan program mewujudkan pula bentuk program yang dilakukan baik secara daring maupun luring.

DENMAS SLAMET

Inovasi "Denmas Slamet" diciptakan sebagai respons terhadap keadaan darurat tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Banyumas, terutama selama pandemi Covid-19. Pandemi tersebut mengubah sistem kesehatan ibu dan anak di wilayah Kabupaten Banyumas dan menyebabkan akses langsung ke layanan kesehatan bagi ibu hamil menjadi minim karena pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini menyebabkan peningkatan drastis dalam kasus kematian ibu dan bayi pada tahun 2021. Analisis data menunjukkan bahwa penyebab kematian ibu yang utama adalah keterlambatan dalam deteksi dan penanganan komplikasi (Dinkes Banyumas, 2023).

Adanya Inovasi Denmas Slamet diperkenalkan di Kabupaten Banyumas dengan tujuan mengatasi masalah keterlambatan deteksi dini komplikasi ibu hamil di masyarakat. Inovasi ini mengusung strategi pemberdayaan masyarakat, sehingga penanganan kasus kematian dan kesakitan ibu hamil, bersalin, dan nifas dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga menekan adanya resiko kematian bayi pula. Melalui Denmas Slamet, kematian ibu hamil dan bayi akibat keterlambatan deteksi dan penanganan di tingkat masyarakat dan fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat dikurangi dengan meningkatkan respons deteksi dini komplikasi ibu hamil, bersalin, dan nifas di masyarakat. Inovasi Denmas Slamet terdiri dari tiga kegiatan utama:

Kampanye "Maca Buku KIA Sedina Selemba Biyunge Slamet Anake Waras": Distribusi buku KIA kepada ibu hamil sebagai media kampanye dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan anggaran desa, puskesmas, dan media sosial. Dalam melaksanakan kampanye membaca buku KIA ini, bidan desa dengan bantuan kader desa menjadi aktor utama pelaksanaan program. Kampanye dalam kehumasan, memiliki tujuan untuk memberi pencerahan, pengertian, dan motivasi kepada masyarakat secara terus menerus terhadap suatu kegiatan atau program. Disisi lain, proses dalam pelaksanaan kampanye didukung pula dengan adanya teknik komunikasi yang terencana dan berkesinambungan untuk menciptakan penyampaian informasi dan citra yang positif (Sugianto & Sembiring, 2019). Hal tersebut menjadi alasan kegiatan kampanye digunakan dalam program ini. Bidan desa bertugas untuk melakukan kampanye serta membimbing sekaligus mengawasi para ibu hamil hingga nifas untuk membaca, mempelajari dan mengisi buku KIA. Proses kehumasan yang terjadi pada program ini diwujudkan dengan edukasi langsung dari bidan dan kader desa kepada ibu hamil hingga nifas.

Pendampingan Jider Jiteng (Siji Kader Siji Wong Meteng): Kader sukarelawan pada tingkat desa diberi edukasi dan pendampingan oleh puskesmas untuk memantau dan berinteraksi dengan para ibu hamil (satu kader bertanggungjawab atas 1-3 ibu hamil) secara door to door, dengan kolaborasi antara puskesmas dan desa serta program Pendampingan Keluarga Harapan (PKH) untuk memudahkan pembiayaan transportasi kunjungan kader. Metode pendampingan dalam program Jider Jiteng tidak jauh berbeda dengan pendampingan kampanye "Maca Buku KIA Sedina Selemba Biyunge Slamet Anake Waras". Hal ini disebabkan karena aktivitas membaca buku KIA termasuk dalam program Jider Jiteng. Disamping itu, pada program ini para bidan melakukan penerapan komunikasi terapeutik sebagai

perwujudan praktik kehumasan. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengurangi beban emosi dan ketakutan pasien, serta mengurangi keraguan pasien yang dapat mempengaruhi orang lain, lingkungan dan dirinya sendiri. Dalam praktik kebidanan, komunikasi terapeutik menjadi semakin penting karena merupakan modal terpenting dalam pelaksanaan pelayanan obstetrik. Artinya bidan dalam bidang komunikasi terapeutik tidak hanya harus mempunyai keahlian ilmiah, intelektual, dan teknis dalam membantu pasien, namun juga didukung dengan rasa kasih sayang, kepedulian, dan komunikasi yang baik (Hayati dan Sari, 2020).

Kelas Mamake Bapake, merupakan program yang diadakan oleh puskesmas dan desa untuk kegiatan kelas ibu hamil secara rutin, dengan menghadirkan suami atau keluarga ibu hamil untuk mendapat edukasi mengenai perawatan bayi dan ibu nifas oleh bidan desa. Kelas tersebut sebagai modifikasi yang terfasilitasi melalui anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas dan Anggaran Desa. Kelas ini dilakukan dalam bentuk edukasi namun tidak dilakukan dengan metode door to door melainkan berkumpul pada suatu tempat.

SATRIA GEMATI

Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan diantaranya sistem monitoring khusus ibu hamil dan balita sudah dilakukan di Kabupaten Banyumas. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Yayasan Project HOPE membuat aplikasi PWS KIA dengan nama SATRIA GEMATI pada tahun 2021. SATRIA GEMATI menyajikan seluruh proses pemantauan kesehatan ibu dan anak sampai dengan rujukan terencana. Proses Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak secara umum dimulai dari pendataan dan pemetaan sasaran program kesehatan ibu dan anak, pencatatan data pelayanan, rujukan terencana, dan pelaporan untuk bahan evaluasi dan pengkajian. Data sasaran yang terdiri atas jumlah seluruh ibu hamil, jumlah seluruh ibu bersalin, jumlah ibu nifas, jumlah seluruh bayi, jumlah seluruh anak balita, dan jumlah seluruh pasangan usia subur diperoleh sejak saat Bidan memulai pekerjaannya di desa atau kelurahan. Data sasaran diinput melalui aplikasi SATRIA GEMATI oleh Bidan dalam rangka kegiatan Pendataan dan Pemetaan Ibu Hamil.

Melalui aplikasi SATRIA GEMATI kesehatan ibu hamil dapat dipantau dari periode ANC (Pemeriksaan Kehamilan), persalinan, hingga PNC (Pemeriksaan pada ibu nifas). Tenaga kesehatan setelah melakukan input data seluruh ibu hamil, selanjutnya dapat memantau periode ANC yang diawali dari masa trimester satu, dua, dan tiga. Bidan di desa atau kelurahan serta di fasilitas pelayanan kesehatan mencatat semua detil pelayanan KIA di dalam aplikasi SATRIA GEMATI pada saat ibu hamil melakukan kunjungan dan atau penapisan (screening) ANC dan PNC dilakukan. Pencatatan tersebut diperlukan untuk memantau secara intensif dan terus-menerus kondisi dan permasalahan yang ditemukan pada para ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita di desa atau kelurahan tersebut. Memasuki periode persalinan data-data bayi yang sudah lahir akan dicatat di aplikasi SATRIA GEMATI (Sistem Aplikasi Terintegrasi Kesehatan Ibu dan Anak Cegah Kematian Ibu dan Bayi). Pada periode PNC atau masa nifas, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan dan pemantauan kepada ibu nifas selama 40 hari dari paska persalinan.

SIJARI EMAS

Pada hari Jumat, 28 Februari 2020 telah ditandatangani kontrak antara PT Sijarimas Teknologi Inovasi dengan PROJECT HOPE dalam pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Banyumas. Kerjasama ini dikhususkan dalam pendampingan implementasi aplikasi sistem informasi Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWSKIA) Sijariemas

yang sudah dikembangkan oleh PT Sijariemas untuk digunakan di Kabupaten Banyumas selama satu tahun, mulai 1 Mei 2020 sampai dengan 30 April 2021. Aplikasi PWSKIA Sijariemas merupakan aplikasi komputer berbasis web dan mobile yang berfungsi untuk pendataan, pemantauan, dan pelaporan pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan seperti Praktek Bidan atau Dokter Mandiri, Klinik Kesehatan, Puskesmas, atau Rumah Sakit. Selain menghasilkan dashboard untuk pemantauan oleh tenaga kesehatan secara individual maupun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Aplikasi PWSKIA Sijariemas juga menghasilkan laporan PWSKIA tingkat Puskesmas dan tingkat kabupaten atau kota.

Cakupan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PT Sijarimas Teknologi Inovasi berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani, antara lain meliputi: Penyiapan perangkat lunak aplikasi PWSKIA Sijariemas untuk digunakan di jejaring pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Banyumas; Memberikan pelatihan bagi calon pengguna aplikasi PWSKIA Sijariemas; Melakukan alih pengetahuan kepada petugas terkait pelayanan KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas; Melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan; Mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan aplikasi PWSKIA Sijariemas; Melakukan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi PWSKIA Sijariemas yang digunakan di Kabupaten Banyumas; Mendampingi uji coba dan demonstrasi dashboard KIA; Memastikan keberfungsian dashboard KIA dan dapat digunakan oleh Bupati Banyumas dalam pemantauan layanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Banyumas.

KOMUNIKASI LINTAS SEKTOR

Hubungan antar sektor yang untuk mengkomunikasikan tujuan bersama menjadi salah satu cara untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan suatu program. Kehadiran pelaksana, hubungan yang terjalin antara pihak yang terlibat, dan kolaborasi yang terjadi memegang peranan penting dalam memaksimalkan efektivitas pelaksanaan program yang telah ditetapkan (Kirana, 2023). Dinas Kesehatan Banyumas melakukan koordinasi dan pembinaan dengan RS PONEK (pelayanan obstetrik neonatal esensial atau emergensi komprehensif) terkait hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP). Disamping itu, RS Rujukan diminta pula untuk memberikan informasi serta umpan balik kepada puskesmas wilayah binaannya dan membuat Tim Task Force bagi ibu hamil yang beresiko didukung dengan optimalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi. Disisilain, Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pula koordinasi dan pembinaan dengan RS PONEK terkait hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP).

Pendampingan Puskesmas dan Rumah Sakit dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dilakukan melalui kegiatan replikasi pasca EMAS (Expanding Maternal Neonatal Survival), yaitu pendampingan ke seluruh puskesmas di Kabupaten Banyumas dengan mempersiapkan puskesmas mampu salin dan puskesmas PONEK (upaya pemerintah dalam menanggulangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai standar menggunakan dana BLUD; Menambah 3 (tiga) RS PONEK sebagai rumah sakit rujukan yang komprehensif melalui Keputusan Bupati Kabupaten Banyumas; Pendekatan pelayanan ANC Terpadu Plus dengan melibatkan dokter umum, dokter gigi, perawat, petugas gizi, dan analis kesehatan untuk cek laboratorium lengkap dan juga berkoordinasi dengan dokter spesialis obsgyn dan ginekolog serta terintegrasi dengan klinik IMS (Infeksi Menular Seksual).

Koordinasi lintas sektoral dilakukan pula melalui sarasehan bersama Bupati (coffe morning) yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Selain itu, hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) ditindaklanjuti bersama tim pengkaji; Mengangkat 15 (limabelas) orang bidan kelurahan surveilans KIA untuk ditempatkan di kelurahan; Menjalin kerjasama melalui MOU Pemeriksaan Skrining Hipotiroid. Seluruh

upaya pemecahan permasalahan tersebut tidak lepas atau dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yaitu dengan adanya Instruksi Bupati Banyumas Nomor 440/3072 Tahun 2017 tentang Upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Banyumas serta Keputusan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pokja Penyelamatan Ibu dan Bayi.

KESIMPULAN

Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis, tidak dapat dilihat secara parsial karena dalam pelaksanaan program saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Seluruh program memiliki peran serta dalam mewujudkan kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara optimal. Penurunan dan pencegahan semakin melonjaknya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banyumas diwujudkan dalam program-program monitoring, edukasi, dan fasilitasi bagi ibu, keluarga, dan tenaga medis. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan teknologi yang didukung dengan aspek-aspek kehumasan serta komunikasi kesehatan yang diwujudkan dalam berbagai program seperti; sistem pendataan dan monitoring secara daring, edukasi kepada ibu hamil hingga nifas sekaligus dengan keluarganya, sosialisasi pada masing-masing bidan puskesmas dan kader, koordinasi antar tenaga kesehatan dan pemerintah serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan optimalisasi Forum Kesehatan Desa.

Pemanfaatan kehumasan dalam menerapkan tujuan komunikasi kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diaplikasikan pada program-program upaya penurunan AKB terwujud yang pada utamanya aktivitas pembedayaan masyarakat dan koordinasi antar tenaga medis atau pejabat pemerintah memiliki strategi yang berbeda namun tujuan yang sama. Pemberdayaan masyarakat melalui kader dan fasilitator kesehatan di masing-masing daerah Kabupaten Banyumas memiliki tujuan untuk dapat langsung menjangkau dan mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Hal ini diupayakan agar proses pencegahan dan penanganan meningkatnya AKB dapat langsung dikondisikan dari akarnya, yaitu masyarakat sendiri. Pada prosesnya, para kader dan fasilitator berupaya unruk membangun kebiasaan pola hidup sehat dan strateginya terutama pada para ibu yang sedang mengandung atau memiliki bayi. Penanaman pengetahuan dan edukasi dilakukan pula oleh para kader dan fasilitator-fasilitator ini.

Upaya internal dilakukan pula oleh pemerintah sendiri dengan melaksanakan pertemuan rutin setiap dua hingga tiga bulan sekali dalam konsep Coffe Morning yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Banyumas, dan pemanfaatan dana APBD II untuk menunjang program pengendalian Angka Kematian Ibu dan Anak serta dukungan dari lintas program dan sektor. Peran pada tenaga kesehatan daerah dilaksanakan pula dalam berbagai bentuk seperti peningkatan fasilitas yang berfokus pada kesehatan ibu bayi serta pelayanan kesehatan yang berdasar pada upaya pencegahan melonjaknya angka kematian ibu dan bayi. Koordinasi dilaksanakan pula oleh masing-masing rumah sakit serta puskesmas di Daerah Banyumas kepada dinas kesehatan maupun antar instansi untuk saling memantau dan membantu dalam mewujudkan meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak di Bayumas. Beberapa program-program yang telah ditelaah pada kajian ini menjadi bukti bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melakukan penerapan kegiatan kehumasan dalam pelaksanaannya. Namun, kajian ini memiliki keterbatasan dalam menguraikan dengan detail dan mengerucut mengenai bentuk riil kegiatan kehumasan yang dilaksanakan di lapangan pada setiap program. Guna melengkapi dan menyempurnakan kajian ini, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam praktik kehumasan secara detail pada setiap program-program yang telah disebutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2024. SDGs Metadata. Diakses pada 26 Maret 2024. <https://sdgs.bappenas.go.id/metadata-indikator-sdgs/>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Detail Metadata Indikator Statistik Angka Kematian Bayi. Diakses pada 26 Maret 2024. <https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/3277>.
- Candraningrum, D. A. (2017). Gangguan Komunikasi Publik dan Penurunan Brand Engagement di Perusahaan Toys”R”Us. *Jurnal Komunikasi Global*, 6(2), 164–174.
- Ginting, S., & Rahmalinda, F. (2018). Peran Public Relations Kantor Bupati Aceh Tamiang Dalam Meningkatkan Citra Positif Kantor Bupati Aceh Tamiang Di Desa Matang Ara Jawa Kecamatan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 2(2), 13–24.
- Hayati, Erlina, and Husna Sari. 2020. “Implementasi Nilai Marsipaingot Dalam Komunikasi Terapeutik Bidan Kepada Ibu Hamil”. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 4 (1):1-13.
- Fitrianingsih, B., & Kholik, A. (2021). Proses Humas Diskominfo Tangerang Selatan Dalam Membangun Citra Positif Melalui Instagram. *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 43-53.
- Kirana, B. S. (2023). Implementasi Program Kesehatan Masyarakat Untuk Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (Sgds) Dalam Upaya Mengurangi Angka Kematian Ibu (Aki) Dan Angka Kematian Bayi (Akab) Di Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 1-16.
- Kurniati, K., Munir, M., Hamidah, L., & Rizky, A. S. (2020). Monitoring dan evaluasi humaspemerintah dalam penggunaan media sosial untuk memerangi hoaks. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 5(1), 78-95.
- Lani, O. P., & Handayani, B. (2021). Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 130-140.
- Paramasari, Silvia Nevane, and Adi Nugroho. 2021. “Strategi Komunikasi Kesehatan Dalam Upaya Membangun Partisipasi Publik Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 5 (1):123-32.
- Puspitasari, E., Lailiyah, F., & Lailin, M. A. H. (2021). Strategi Humas Protokol Pemerintahan Kabupaten Jombang. *Pawitra Komunika: Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora*, 2(1), 1-11.
- Simamora, Nurhawati, and Mega Ulva Sari Sihombing. 2019. “Strategi Public Relations Pt Pelindo 1 Dalam Membangun Relasi Dengan Media Cetak Harian Di Medan”. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 2 (1):78-89.
- Sugianto, Arifin, and Antonius Wilson Sembiring. 2019. “Kampanye Public Relations Dalam Membentuk Sikap Positif Khalayak”. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 2 (1):45-60.
- Surayya, Rahmi. (2018). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan. | *Averrous: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 1(2), 75
- Triyono, A., & Wibowo, Y. A. (2018). Strategi Komunikasi Pembangunan Tim Promosi Kesehatan Puskesmas Polokarto melalui Program Desa Siaga. *Jurnal Komunikasi Global*, 7(1), 68–86.